

Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Kajian Literatur

Muhammad Rizky Akbar¹, Dea Pratama Putri², Nor Sapitri³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Kata Kunci:

Korupsi, pertumbuhan ekonomi, daerah

Keywords:

Corruption, economic growth, region



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dibahas dalam artikel ini melalui analisis literatur. Korupsi dianggap sebagai hambatan utama untuk pembangunan karena dapat menghambat anggaran, menghentikan investasi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks, tergantung pada seberapa baik institusi dan tata kelola di daerah tersebut. Untuk menganalisis dinamika tersebut, artikel ini menggunakan teknik tinjauan pustaka dari berbagai jurnal nasional dan internasional, serta laporan institusi resmi. Kajian menunjukkan bahwa korupsi di daerah dapat mengurangi PDRB, kualitas infrastruktur, dan partisipasi investor. Namun, korupsi dapat berfungsi sebagai “pelumas” yang mempercepat proses ekonomi dalam beberapa situasi tertentu di negara dengan birokrasi yang sangat lamban, meskipun konsekuensi jangka panjangnya tetap merugikan. Akibatnya, untuk menekan korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, reformasi kelembagaan yang menyeluruh, peningkatan transparansi, dan pengawasan publik diperlukan.

ABSTRACT

The impact of corruption on regional economic growth in Indonesia is discussed in this article through literature analysis. Corruption is considered a major obstacle to development because it can hamper budgets, stop investment, and undermine public trust in the government. Previous studies have shown that the relationship between corruption and economic growth is very complex, depending on how good the institutions and governance are in the region. To analyze these dynamics, this article uses a literature review technique from various national and international journals, as well as official institutional reports. The study shows that corruption in the region can reduce GRDP, infrastructure quality, and investor participation. However, corruption can function as a “lubricant” that accelerates economic processes in certain situations in countries with very slow bureaucracies, although its long-term consequences remain detrimental. Consequently, to suppress corruption and promote sustainable economic growth, comprehensive institutional reform, increased transparency, and public oversight are needed.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Di negara berkembang seperti Indonesia, korupsi memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi. Transparency International mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi kendala serius dalam pembangunan ekonomi.

Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Misalnya, alokasi anggaran yang tidak efisien akibat tindakan korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, praktik korupsi dalam sektor investasi dan perizinan usaha dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan daya tarik investasi di suatu daerah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Baizatul Akman dan Diana Sapha A.H menemukan bahwa meskipun IPK di Indonesia mengalami peningkatan, dampaknya terhadap pertumbuhan

*Corresponding author

E-mail addresses: norsapitry@gmail.com

ekonomi tidak signifikan secara statistik. Hasil serupa ditemukan oleh Raldin Alif Al Hazmi, yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara kemiskinan memiliki dampak yang lebih nyata.

Namun, terdapat perbedaan dalam beberapa temuan penelitian yang menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, korupsi dapat memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama terjadi di daerah dengan kebebasan ekonomi yang tinggi, di mana pelaku usaha memanfaatkan praktik korupsi untuk mempercepat birokrasi yang berbelit.

Dengan melihat kompleksitas hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memberantas korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemampuan dan keberhasilan suatu negara dalam menerapkan pembangunan menentukan indikator kemajuannya. Proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dikenal sebagai pembangunan negara. Kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan adalah tujuan utama pembangunan. Husaini (2017) menyatakan bahwa pembiayaan dan sumber daya manusia adalah dua komponen utama yang menentukan keberhasilan dan efektivitas pembangunan. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam proses dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Faktor manusia memiliki peran terbesar dalam mempengaruhi pembangunan.

Namun demikian, partisipasi warga negara dalam pembangunan masih belum optimal, terutama dalam era reformasi saat ini. Karena sumber daya alamnya yang melimpah dan beragam, Indonesia disebut sebagai "paru-paru dunia". Kekayaan alam tidak dapat diimbangi dengan pembangunan yang optimal, sayangnya. Ironisnya, meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang daripada negara maju di Asia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik dari segi pengetahuan maupun moralitas dan integritas pribadi, adalah penyebab utama kondisi ini. Salah satu penyakit sosial yang paling mematikan, korupsi mengancam seluruh aspek kehidupan negara dan bangsa. Kerugian ekonomi negara yang signifikan disebabkan oleh korupsi, menurut Astuti dan Chariri (2015). Ahok menyatakan, "Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu, cukup jangan korupsi saja itu sudah cukup menolong negara kita." Kutipan ini menunjukkan seberapa berbahaya praktik korupsi terhadap pembangunan dan ekonomi negara.

Di Indonesia, praktik korupsi sudah mendarah daging dan tersebar luas, bahkan dilakukan secara kolektif oleh sejumlah oknum pemerintah, yang menunjukkan rendahnya moralitas dan hilangnya rasa malu di kalangan birokrasi, yang pada akhirnya akan menghambat operasi pemerintahan. Laporan yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 pada tahun 2022 dalam Indeks Persepsi Korupsi, turun dari skor 38 pada tahun sebelumnya. Dari 180 negara, Indonesia berada di peringkat ke-110. Angka-angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan masalah besar di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah membentuk lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi tingkat korupsi, masih ada banyak masalah yang belum diselesaikan. Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah kemiskinan juga. Pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meskipun jumlah penduduk miskin masih tinggi. Korupsi dan kemiskinan terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Korupsi melemahkan fondasi ekonomi negara, sementara pemerintah terus menerapkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, penting untuk meninjau kembali secara menyeluruh bagaimana korupsi memengaruhi kemajuan ekonomi, terutama di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kajian literatur *riview* digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, prosiding, dan publikasi lembaga resmi yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis literatur yang membahas korupsi dan pertumbuhan ekonomi, serta kualitas sumber dan relevansinya dengan subjek penelitian. Hasil analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, yang berarti mengkaji dan membandingkan temuan dari berbagai studi sebelumnya untuk menemukan pola, perbedaan, dan korelasi antara variabel yang diteliti. Metode ini memungkinkan penulis untuk menguraikan secara menyeluruh dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu hambatan utama dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, adalah korupsi. Studi yang dilakukan oleh Naci Mocan (2007) dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teori institusional dan pendekatan empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua cara untuk mengukur korupsi: pertama persepsi, seperti yang dilakukan oleh Transparency International dan World Bank, dan pengalaman langsung warga negara yang menerima suap dari pejabat pemerintah seperti polisi, petugas bea cukai, dan inspektur. Kuantitas langsung ini meningkatkan pemahaman kita tentang skala dan kedalaman praktik korupsi di suatu negara—termasuk di tingkat lokal.

Studi ini menyatakan bahwa korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, korupsi menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya publik, menghambat investasi asing langsung (FDI), dan menurunkan efisiensi institusi publik dan birokrasi. Dalam model pertumbuhan endogen yang digunakan oleh Mocan, ini terjadi karena pejabat birokrasi lebih tertarik untuk mengejar "rente" atau keuntungan dari posisi mereka dari memberikan layanan publik yang efektif.

Karena lembaga lokal biasanya memiliki kelemahan struktural dan pengawasan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemerintahan pusat, korupsi di tingkat daerah menjadi semakin nyata. Penyalahgunaan kekuasaan dan suap menjadi lebih mudah ketika pejabat daerah memiliki banyak wewenang tanpa tanggungjawab yang memadai. Mocan menyoroti bahwa faktor utama dalam menilai dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kualitas institusi. Negara atau wilayah dengan institusi yang lemah lebih rentan terhadap praktik korupsi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai macam cara, seperti menurunnya kepercayaan publik, penurunan efisiensi fiskal, dan kerusakan iklim investasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penyuaipan meningkatkan persepsi masyarakat tentang korupsi pemerintah. Misalnya, tingkat suap yang dilaporkan di Indonesia mencapai 31%, menunjukkan korupsi yang luas dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Situasi ini memperburuk kualitas layanan publik di daerah dan memperlambat pembangunan infrastruktur dan sektor sosial ekonomi. Karena pelaku usaha cenderung menghindari daerah dengan biaya transaksi yang tinggi karena korupsi, daerah dengan birokrasi yang tidak berintegritas akan lebih lambat berkembang.

Selain itu, Mocan menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi tidak selalu linier. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan menjadi lebih kompleks ketika kualitas institusi diukur menggunakan risiko pengambilalihan paksa atau

pengambilalihan. Upaya untuk mengurangi korupsi tidak akan serta-merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika tidak ada pembenahan institusi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi daerah harus dikombinasikan dengan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Selain itu, struktur budaya dan huku memengaruhi pertumbuhan dan tingkat korupsi. Korupsi cenderung lebih rendah di negara-negara dengan tradisi hukum yang menekankan hak individu dan sistem pemerintahan yang desentralisasi. Namun, sistem federal juga dapat berguna tanpa sistem pengawasan yang kuat untuk mendukung otonomi daerah, kemungkinan korupsi akan meningkat. Ini berlaku di Indonesia, yang memiliki sistem desentralisasi. Pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam hal ini. Dalam pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan, pemerintah daerah yang tidak memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik akan menjadi titik lemah.

Dengan mempertimbangkan hasil temuan Mocan (2007), dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggungjawab penegak hukum itu adalah masalah sistemik yang membutuhkan peningkatan institusional, pengembangan kontrol sosial, dan peningkatan kualitas SDM birokrasi. Korupsi akan terus menghalangi pertumbuhan ekonomi jika tidak ada reformasi mendalam. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk gagasan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai dasar pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi Korupsi

Dalam sektor publik dan swasta, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi disebut korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai "penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam definisi ini, elemen keuangan dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu sangat penting. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara resmi menjelaskan korupsi, menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Namun, istilah "penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi" digunakan oleh organisasi internasional seperti Transparency International (Transparency International Indonesia, 2024). Pendapat ini mencakup aktor sektor swasta dan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan.

Korupsi juga termasuk berbagai jenis, seperti suap, yang berarti memberikan atau menerima imbalan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan; nepotisme, yang berarti memberikan keuntungan kepada keluarga atau kroni tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka; penggelapan dana publik, yang berarti mencuri atau menyalahgunakan dana yang dialokasikan untuk kepentingan umum; dan gratifikasi, yang berarti memberikan hadiah yang terkait dengan posisi seseorang atau sebaliknya. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Tipikor mengatur sedikitnya 30 jenis tindak pidana korupsi, termasuk menyuap hakim dan advokat serta memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena posisinya (KPK, 2022). Selain itu, korupsi juga dapat dikategorikan berdasarkan ukuran dan efeknya. Ada beberapa jenis korupsi: kecil (korupsi kecil), besar (korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan dana besar), dan politik (korupsi yang berdampak pada sistem kebijakan atau demokrasi negara) (ACLC KPK, 2023).

Korupsi oleh karena itu tidak hanya merupakan pelanggaran moral dan hukum, tetapi juga merusak institusi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, termasuk di tingkat daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Salah satu komponen penting dari pembangunan sebuah daerah adalah pertumbuhan ekonomi daerah, yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan output ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah (Iskandar & Nuraini, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja ekonomi daerah dan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan.

PDRB juga menunjukkan total nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu daerah. (Ngabiyanto et al., 2024)

Tingkat investasi, kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur adalah indikator lain yang penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah selain PDRB. Dengan meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru, investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Haryanto, A., & Suwandi, 2018). infrastruktur yang baik dapat menarik investasi penting untuk meningkatkan output ekonomi.

Selain itu, peningkatan kesempatan kerja merupakan indikator penting dari pertumbuhan ekonomi daerah. Sebuah penelitian oleh (Zubaydah et al., 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada kesempatan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, bukan hanya peningkatan PDRB yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan kesempatan kerja yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Teori Ekonomi Terkait

Ada banyak teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Teori-teori ini termasuk teori pertumbuhan ekonomi dan teori kelembagaan, yang keduanya menekankan peran institusi dalam pembangunan ekonomi.

Pada jurnal *Journal of Mathematical Economics and Finance* karya (Schilirò, 2018) menjelaskan tentang model Solow Growth yang diciptakan pada tahun 1956, merupakan salah satu model penting dalam teori pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Di jurnal *Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy* karya (Jones, 2019) yang menggunakan *Endogenous Growth Theory* sebagai pengembangan dari model Solow. Berbeda dengan model Solow, teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor internal dalam sistem ekonomi, seperti inovasi teknologi, akumulasi modal manusia, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Menurut teori ini, kemajuan teknologi adalah hasil dari keputusan ekonomi agen-agen dalam sistem, bukan dari sumber luar.

Dalam teori kelembagaan, peran institusi dalam pembangunan ekonomi tidak hanya difokuskan pada faktor ekonomi tradisional. Teori ini didirikan oleh Douglass North, yang berpendapat bahwa institusi, baik formal (misalnya, hukum dan peraturan) maupun informal (misalnya, norma dan budaya), membentuk insentif ekonomi dan mempengaruhi kinerja ekonomi suatu negara. Institusi yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian.

Pembangunan ekonomi terkait dengan konsep kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas,

partisipasi publik, dan supremasi hukum. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena lingkungan yang stabil dan akurat mendorong investasi dan efisiensi ekonomi.

Oleh karena itu, memahami teori pertumbuhan ekonomi dan fungsi institusi memberikan kerangka kerja yang luas untuk menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Dimungkinkan untuk melakukan integrasi antara komponen institusional dan ekonomi untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Korupsi sebagai Hambatan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi telah lama diakui sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, merusak kepercayaan masyarakat, dan memperburuk kualitas layanan public (Simanjuntak et al., 2023). Praktik korupsi merusak kepercayaan investor, merusak iklim bisnis, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan (Nurrisqilah Putri et al., 2024). Dalam situasi ini, korupsi bukanlah pelumas perekonomian; sebaliknya, itu adalah "sand the wheels", atau penghambat roda perekonomian (Putri et al., 2025).

Korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan investor, yang mengurangi investasi asing dan domestik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi peluang kerja. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, korupsi bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi melalui inefisiensi alokasi sumber daya dan penurunan investasi; oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh masyarakat (Putri et al., 2025).

Beberapa Literatur Alternatif: Korupsi Sebagai "Grease the Wheels"

Dalam literatur ilmiah, terdapat pandangan alternatif yang menyatakan bahwa korupsi tidak selalu bersifat destruktif. Salah satu argumen paling kontroversial adalah bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas roda ("grease the wheels") dalam sistem birokrasi yang lamban atau terlalu kaku. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa ketika institusi dan prosedur pemerintahan sangat tidak efisien, praktik suap dapat menjadi solusi informal yang mempercepat proses administratif dan memungkinkan aktivitas ekonomi terus berjalan.

Hipotesis ini didukung oleh sejumlah studi. Misalnya, (Leff, 1964), berpendapat bahwa suap dapat berfungsi sebagai alat pragmatis untuk meningkatkan efisiensi dalam negara berkembang dengan birokrasi yang lamban dan terlalu formalistik. Dalam penelitiannya yang lebih netral, (Mauro, 1995), juga mengatakan bahwa, tergantung pada konteks institusional suatu negara, hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih kompleks daripada yang dianggap umum. Dalam penelitiannya yang lebih netral, Mauro (1995) juga mengatakan bahwa, tergantung pada konteks institusional suatu negara, hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih kompleks daripada yang dianggap umum.

Studi-studi lebih baru, bagaimanapun, mengkritik perspektif ini. Karena korupsi menimbulkan lebih banyak ketidakpastian dan distorsi dalam proses bisnis, menentang hipotesis "grease the wheels". Mereka menemukan bahwa pejabat yang menerima suap lebih suka memperlambat birokrasi sehingga pembayaran informal terus mengalir, yang menghasilkan ketergantungan dan menurunkan efisiensi. (Bardhan, 2017) juga menekankan bahwa korupsi secara keseluruhan mengurangi kredibilitas institusi dan menurunkan akuntabilitas pemerintahan, meskipun dampak "positif" mungkin muncul dalam jangka pendek.

Oleh karena itu, meskipun beberapa penelitian telah mencoba melihat korupsi dari sudut pandang fungsional, sebagian besar penelitian saat ini menolak ide ini dan menunjukkan bahwa dampak negatif korupsi terhadap tata kelola dan pelayanan publik dalam jangka panjang.

Hasil Kajian Literatur

a. Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Secara

umum diketahui bahwa korupsi menghambat alokasi anggaran yang efektif, mengurangi kepercayaan investor, dan mengurangi kemampuan fiskal pemerintah daerah. Studi oleh (Tanzi & Davoodi, 1997) menemukan bahwa korupsi berdampak besar pada kualitas belanja publik, terutama layanan publik dan infrastruktur yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Korupsi di tingkat daerah sering menyebabkan anggaran terbuang, proyek infrastruktur palsu, dan mark-up biaya pengadaan barang dan jasa. Ini menyebabkan penurunan PAD dan ketidakefisienan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akibat rendahnya produktivitas dan kurangnya investasi sektor riil, daerah dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi, menurut (Claudio Ferraz & Frederico Finan, 2011). Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dreher & Herzfeld, 2011), korupsi meningkatkan ketidakpastian hukum dan biaya transaksi, yang menurunkan kualitas usaha.

b. Hasil Studi Empiris di Indonesia: Hasil di atas didukung oleh sejumlah studi empiris yang dilakukan di Indonesia, yang sebagian besar berfokus pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam studi berbasis data panel yang melibatkan 393 kabupaten/kota, (Ahn & Park, 2014), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh korupsi. Jumlah PDRB per kapita yang rendah berkorelasi dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Studi lain oleh (Anan, 2019), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak signifikan terhadap tingkat korupsi di kota dan kabupaten di Indonesia. Studi ini menyoroti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak selalu diikuti dengan peningkatan akuntabilitas, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi di tingkat lokal. (Tanjung Sutarna et al., 2021) menemukan bahwa mengeksplorasi korupsi di tingkat lokal pasca-desentralisasi dan menemukan bahwa struktur prismatic dalam masyarakat memungkinkan elit lokal mereplikasi praktik korupsi. Studi ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat membuka ruang bagi korupsi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif.

c. Faktor Moderator: Banyak penelitian telah menunjukkan dampak buruk korupsi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak ini tidak konsisten dan dipengaruhi oleh faktor moderator seperti kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Menurut (Méon & Sekkat, 2005), korupsi lebih berbahaya di negara atau wilayah dengan institusi yang lemah. Dalam hal Indonesia, Tingkat transparansi anggaran dan partisipasi publik adalah komponen moderator tambahan. (Arifin et al., 2015) menemukan bahwa kualitas tata kelola lokal yang buruk berkontribusi pada tingginya kasus ketidakpatuhan yang dapat dianggap sebagai proxy untuk perilaku korupsi. Studi ini menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat untuk meminimalkan kemungkinan pejabat daerah terlibat dalam perilaku korup. (Saputra, 2012) juga menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat korupsi di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal tanpa pengawasan yang memadai dapat memperburuk praktik korupsi di tingkat daerah. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dan partisipasi publik sangat penting untuk mengurangi efek negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Kajian penelitian telah menunjukkan bahwa ada bukti yang cukup kuat bahwa korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa korupsi mengurangi efektivitas kebijakan fiskal daerah, menurunkan kepercayaan investor, dan memperburuk alokasi sumber daya publik. Teori sand the wheels, yang menganggap korupsi sebagai penghambat utama pembangunan ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh Mauro (1995) dan Tanzi & Davoodi (1997), mendukung temuan ini.

Namun, temuan ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan lokal setiap wilayah. Dalam hal kapasitas birokrasi, transparansi anggaran, dan efektivitas lembaga pengawasan internal,

kelembagaan daerah di Indonesia sangat beragam. Sebuah penelitian oleh Suhendra (2022) menunjukkan bahwa daerah yang tidak memiliki sistem pengawasan publik yang efektif dan institusi yang lemah mengalami efek yang lebih parah dari korupsi. Sebaliknya, tata kelola fiskal yang lebih transparan dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dapat mengurangi dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, literatur yang tersedia masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya data korupsi yang lengkap di tingkat kabupaten atau kota. Akibatnya, sebagian besar penelitian menggunakan metrik tidak langsung seperti jumlah kasus yang ditangani oleh aparat hukum atau persepsi korupsi. Selain itu, sebagian besar penelitian bersifat cross-sectional dan tidak memperhitungkan dampak jangka panjang atau dinamika waktu dari korupsi terhadap pembangunan daerah. Sebagian besar penelitian menggunakan model regresi linier sederhana tanpa mempertimbangkan endogenitas antara pertumbuhan dan korupsi, yang menimbulkan keterbatasan metodologis lainnya.

Terlihat bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan tidak selalu linier, jika dibandingkan dengan studi di negara lain, seperti Méon & Weill (2010), yang menyelidiki negara-negara dengan institusi lemah. Dalam situasi tertentu, korupsi dapat berfungsi sebagai "grease" dalam sistem yang sangat birokratis. Namun, bukti empiris di Indonesia lebih cenderung menunjukkan bahwa fungsi "grease" ini sangat terbatas, dan efek negatif korupsi lebih dominan. Ini konsisten dengan penemuan Dreher dan Herzfeld (2005) dalam meta-analisis mereka terhadap berbagai studi lintas negara, yang menyimpulkan bahwa korupsi secara rata-rata menghambat pertumbuhan, meskipun intensitas dampaknya sangat bergantung pada kualitas institusi dan pemerintahan di masing-masing negara.

SIMPULAN

Korupsi memiliki efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Korupsi menghambat investasi, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Di daerah dengan kelembagaan yang lemah dan kurangnya pengawasan publik, korupsi semakin parah. Beberapa orang percaya bahwa korupsi dapat mempercepat birokrasi dalam situasi tertentu, tetapi kebanyakan bukti empiris menunjukkan bahwa konsekuensi jangka panjang korupsi masih merugikan. Penguatan institusi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah adalah semua hal yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Untuk menghentikan korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, reformasi kelembagaan dan tata kelola yang baik sangat penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Serta Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penulisan ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam jurnal ini, sehingga masukan dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, J. Bin, & Park, C. G. (2014). Exchange rate pass-through to domestic producer prices: Evidence from Korean firm-level pricing survey. *Economics Letters*, 125(1), 138-142. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.05.022>
- Anan, E. (2019). Effect of Fiscal Desentralization and Region-wide Corruption Level in Indonesia. 367, 246-251. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.50>

- Arifin, T., Trinugroho, I., Prabowo, M. A., Sutaryo, S., & Muhtar, M. (2015). Local governance and corruption: Evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 12(4CONT1), 194-199. <https://doi.org/10.22495/cocv12i4c1p3>
- Bardhan, P. (2017). Corruption and Development: A Review of Issues. *Political Corruption: Concepts and Contexts: Third Edition*, 35(3), 321-338. <https://doi.org/10.4324/9781315126647-30>
- Claudio Ferraz, & Frederico Finan. (2011). Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments. *American Economic Review*, 101(4), 1274-1311.
- Dreher, A., & Herzfeld, T. (2011). The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence. *SSRN Electronic Journal*, June. <https://doi.org/10.2139/ssrn.734184>
- Haryanto, A., & Suwandi, S. (2018). PENGARUH INFRASTRUKTUR PUBLIK TERHADAP PDRB PER KAPITA TAHUN 2013-2022. 9(1), 603-628.
- Iskandar, & Nuraini. (2019). Pengaruh Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 57-64.
- Jones, C. I. (2019). Paul Romer: Ideas, Nonrivalry, and Endogenous Growth. *Scandinavian Journal of Economics*, 121(3), 859-883. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12370>
- Leff, N. H. (1964). Economic Development Through Bureaucratic Corruption. *American Behavioral Scientist*, 8(3), 8-14. <https://doi.org/10.1177/000276426400800303>
- Mauro, P. (1995). CORRUPTION AND GROWTH * I. INTRODUCTION Many economists argue that malfunctioning government institutions constitute a severe obstacle to investment, entrepreneurship, and innovation. North [1990] emphasizes the importance of determinant of econ. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712.
- Méon, P. G., & Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? *Public Choice*, 122(1-2), 69-97. <https://doi.org/10.1007/s11127-005-3988-0>
- Ngabiyanto, N., Nurkhin, A., Rahman, Y. A., Fauzi, A. S., Lestari, P., Saputro, I. H., & Algifari, A. (2024). Analisis Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Business and Accounting Education Journal*, 5(2), 313-324. <https://doi.org/10.15294/baej.v5i2.12563>
- Nurriqilah Putri, A., Fernando, R., Lusiana Putri, C., Muhammed Alkasadi, S., & Nurrohmat, D. (2024). Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 50-57.
- Putri, E. S., Balian, A. H., Lampung, U. B., & History, A. (2025). Corruption is a serious issue that has far-reaching impacts on various aspects of life, including the economic sector. This article. 12(2).
- Saputra, B. (2012). the Impact of Fiscal Decentralization on Corruption in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3), 293-309.
- Schilirò, D. (2018). A Glance at Solow's Growth Theory. *Journal of Mathematical Economics and Finance*, 3(2(5)), 83. [https://doi.org/10.14505/jmef.v3.2\(5\).04](https://doi.org/10.14505/jmef.v3.2(5).04)
- Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridawati, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 51-60.
- Tanjung Sutarna, I., Agus Margono, S., & Heruanto Hadna, A. (2021). Post Decentralization Corruption: A study on perpetual corruption at the local level in West Lombok. *Policy & Governance Review*, 5(3), 274. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i3.461>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. (1997). Corruption, Public Investment and Growth, *International Monetary Fund*. In *IMF Working Papers* (Vol. 97, p. 139).

Zubaydah, R., Afifuddin, S., & Albar Tanjung, A. (2022). The Influence of Infrastructure, Investment and Economic Growth on the Welfare of the Community through Employment Opportunities in North Sumatra Province. *International Journal of Research and Review*, 9(5), 343-366. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220542>